



# PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

## DINAS PERHUBUNGAN

ALAMAT : JALAN ALIANYANG NOMOR 7 TELEPON (0561)767136 FAX (0561) 767136  
PONTIANAK – 78116 KALIMANTAN BARAT

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK

NOMOR : 37/DISHUB/2021

Tentang

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan adanya perubahan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pontianak, maka dipandang perlu untuk merubah Standar Operasional Prosedur Dinas Perhubungan Kota Pontianak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Standar operasional Prosedur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Pontianak perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.Pan/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 17 seri E Nomor 7);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
14. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan Struktur, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

- KEDUA : Pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 01 Maret 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA PONTIANAK,



Dra. Hj. UTIN SRI LENA CANDRAMIDI, M.Si.

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Pontianak (sebagai laporan).
2. Inspektur Kota Pontianak.
3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pontianak.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK  
 NOMOR : 37/DISHUB/2021  
 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK

NO	NAMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	BAGIAN PELAKSANA
1	Pengagendaan Surat	Subbagian Umum dan Aparatur Sekretariat Dinas
2	Penanganan Surat Masuk	
3	Penanganan Surat Keluar	
4	Pengiriman Surat Keluar	
5	Pembuatan Surat Edaran	
6	Penerbitan SK Kepala OPD	
7	Pembuatan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)	
8	Pelayanan Izin Penelitian Mahasiswa	
9	Rekapitulasi Kehadiran Kerja ASN	
10	Pelayanan Penerbitan Surat Ijin Cuti Aparatur Sipil Negara	
11	Pelayanan Usulan Kenaikan Gaji Berkala	
12	Pengusulan Kenaikan Pangkat Reguler	
13	Penerbitan Penetapan Angka Kredit (PAK)	
14	Pelayanan Pengusulan Kenaikan Pangkat Pilihan	
15	Pengusulan Pensiun Aparatur Sipil Negara	
16	Pelayanan Pengusulan Perubahan Jenjang Jabatan Fungsional Tertentu	
17	Pelayanan Usulan Izin Belajar dan Tugas Belajar	
18	Pengusulan DIKLAT	
19	Pengusulan Ujian Dinas	
20	Pelayanan Usulan Ujian Penyesuaian Ijazah	
21	Pelayanan Usulan Izin Perceraian	
22	Pengusulan Mutasi Keluar dari Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak	
23	Pengusulan Mutasi Masuk dari Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak	
24	Pengusulan Perubahan Status CPNS menjadi PNS	
25	Pelayanan Usulan TASPEN	
26	Pengumpulan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	
27	Pengusulan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS	
28	Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS	
29	Pelayanan Usulan KARIS, KARSU dan KARPEG / KPE	
30	Pengusulan Penghargaan Satya Lencana / PNS Teladan	
31	Pembinaan Aparatur Sipil Negara	
32	Pengajuan Usulan Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)	
33	Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	
34	Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja (ANJAB dan ABK)	
35	Penyusunan Formasi dan Bezzeting	
36	Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	
37	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
38	Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	
39	Penanganan Pengaduan Masyarakat	
40	Penyimpanan Barang	
41	Pemeriksaan Fisik Persediaan	
42	Pengurusan Barang	
43	Pelayanan Tamu	

44	Persiapan Pelaksanaan Rapat	
45	Penanganan Rumah Tangga Kantor	
46	Pengamanan Kantor	
47	Penyusunan Profil	
48	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)	
49	Penyusunan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	
50	Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)	
51	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	
52	Penyusunan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	
53	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	
54	Pengisian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	
55	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	
56	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi (RB)	
57	Verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ)	
58	Penyusunan Buku Simpanan Bank	
59	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD	
60	Penyusunan Buku Kas Tunai	
61	Pembayaran Gaji	
62	SPJ Fungsional	
63	Penyusunan Buku Kas Umum	
64	Penyusunan Buku Pajak	
65	Penyusunan Buku Panjar	
66	Rekapitulasi Rincian Objek Belanja (ROB)	
67	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	
68	Penyusunan Kertas Kerja (WORKSHEET)	
69	Penyusunan Buku Besar	
70	Pencairan Dana	
71	Pelayanan Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS	
72	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)	
73	Penyusunan Anggaran Kas APBD (Murni dan Perubahan)	
74	Penyusunan Prognosis	
75	Pengesahan Laporan SPJ	
76	SPJ Administratif	
77	Register Penutupan Kas	
78	Penyusunan Neraca	
79	Penyusunan Neraca Saldo	
80	Penjurnalan	
81	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	
82	Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)	
83	Izin Parkir Di Tepi Jalan Umum	Seksi Pengelolaan Perparkiran Bidang LLAJ
84	Penerimaan retribusi tempat khusus parkir	
85	Penerbitan Kartu Pengawasan Kendaraan Angkutan	
86	Pelayanan Pembayaran Retribusi Terminal Dalam Kota	
87	Pelayanan Retribusi Terminal Angkutan Kota Dalam Propinsi	
88	Pengoperasian Bus Rapid Transit (BRT)	
89	Sewa Bus Rapid Transit (BRT)	
90	Penerbitan Rekomendasi Izin usaha Angkutan Antar Kota/Kabupaten Dalam Propinsi	
91	Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)	
92	Patroli Pengawasan Lalu Lintas	
93	Penindakan Pelanggaran Lalulintas	Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaturan LLAJ Bidang LLAJ

Subbagian  
Perencanaan dan  
Keuangan Dinas

94	Pembangunan Perlengkapan Jalan	Seksi Pembangunan dan Operasional Bidang Perlengkapan Jalan
95	Pembangunan Penerangan Jalan Umum	
96	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Seksi Penerangan Jalan Umum Bidang Perlengkapan Jalan
97	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	
98	Porporasi Tiket Pas Masuk Penyeberangan Bardan – Siantan	Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan Sungai dan Penyeberangan Bidang Angkutan Sungai dan Penyeberangan
99	Penyetoran Retribusi Penyeberangan Bardan – Siantan Ke Kas Daerah	
100	Pengaturan Ketinggian Jembatan Bergerak	
101	Pengawasan Dan Pengendalian Angkutan Sungai Dan Penyeberangan	Seksi Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Sungai dan Penyeberangan Bidang Angkutan Sungai dan Penyeberangan
102	Tata Cara Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
103	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	
104	Pelayanan Mutasi Pengujian Kendaraan Bermotor	
105	Pelayanan Rekomendasi Numpang Uji Pengujian Kendaraan Bermotor	
106	Pelayanan Penggantian Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Hilang/Rusak	
107	Pelayanan Penilaian Fisik Kendaraan Bermotor Yang Akan Dihapuskan	

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 01 Maret 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA PONTIANAK,



Dra. Hj. UTIN SRI LENA CANDRAMIDI, M.Si.